
Pengaruh Temuan Audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Opini Audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Struktur Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Dede Kurnia¹

*Email : tembongkarundang@gmail.com

Abstraksi

Peran Pemerintah Daerah dalam penyediaan layanan publik dan pencapaian tujuan pembangunan nasional menjadi semakin besar. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya sistem pengendalian, evaluasi dan pengukuran kinerja yang sistematis untuk mengukur kemajuan yang dicapai Pemerintah Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji pengaruh Temuan Audit, Opini Audit, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, dan Struktur Anggaran terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten. Hipotesis yang diajukan (1) Temuan Audit berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten; (2) Opini Audit berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten; (3) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten; (4) Struktur Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten tahun 2013-2016. Sampel yang digunakan sebanyak 4 Kabupaten dan 4 Kota di Provinsi Banten setiap tahunnya. Total sampel ialah 32 dari 4 tahun pengamatan (2013, 2014, 2015 dan 2016). Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan menggunakan software SPSS IBM Statistics 22. Hasil Penelitian, menunjukkan bahwa Temuan Audit tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten; Opini Audit berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten; Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan berpengaruh dengan arah negatif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten; Struktur Anggaran tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten. Sementara itu berdasarkan analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa seluruh variabel independen (bebas) mempengaruhi secara simultan variabel dependen (terikat) sebesar 14.4% variabel Kinerja Pemerintah Daerah dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya sebesar 85.6% dijelaskan oleh variabel lain diluar model yang diteliti.

Kata kunci: BPK, Temuan Audit, Opini Audit, TLHP, Struktur Anggaran dan Kinerja Pemerintah Daerah.



PENDAHULUAN

Kinerja adalah sesuatu yang dicapai atau prestasi yang diperlihatkan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001). Sedangkan pengukuran kinerja dikemukakan oleh Westin (1998) dalam Sumarjo (2010) proses pengawasan secara terus menerus dan pelaporan capaian kegiatan, khususnya kemajuan atas tujuan yang direncanakan. Kinerja mampu memberikan dampak yang positif jika dilakukan dan diawasi dengan baik oleh para pemangku kepentingan di tataran pemerintahan dan pembagian tugas dan kegiatan untuk mencapai suatu hal yang telah ditetapkan.

BPK dalam hal ini berperan aktif sebagai instansi yang mengawasi keuangan yang dikelola pemerintahan dan bersinergi untuk menciptakan output hasil kinerja pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan terbaik di semua sektor untuk masyarakat yang menjadi fokus utama hasil kinerja yang dilakukan pemerintahan. Setelah berjalannya reformasi perubahan struktur dan segala hal yang terjadi di birokrasi pemerintahan tetapi tujuan akhirnya bermuara pada kinerja yang mampu melaksanakan tujuan yang telah ditetapkan dan direncanakan sebelumnya dengan sebaik baiknya.

Sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah wajib menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang kemudian akan di audit oleh institusi pemeriksa yang bebas dan mandiri, dalam hal ini adalah (BPK RI).

Pemerintah Daerah dalam melayani masyarakat melakukan pengelolaan atas keuangan daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah, LPPD suatu pemda merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dan memerlukan pengawasan serta pemeriksaan (audit) yang baik agar tidak terjadi kecurangan.

Selain Laporan Keuangan yang menggambarkan akuntabilitas keuangan, dalam rangka mewujudkan *good governance* pada Pemerintah Daerah, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (akuntabilitas kinerja).

Praktik akuntansi pemerintahan muncul sebagai salah satu akibat dari kurangnya insentif bagi pemilih (voters) untuk mengawasi perilaku politisi (pemerintah) secara langsung (Zimmerman, 1997).

Shaw (2010) berpendapat bahwa insentif melakukan pengawasan atas pelaksanaan penyediaan barang publik oleh pemerintah tidak sebanding dengan waktu dan sumber daya yang dikeluarkan untuk memastikan bahwa pemerintah telah menyediakan barang publik secara tepat. Selain itu, rendahnya pengawasan atas proses penyelenggaraan pemerintahan memicu timbulnya penyelewengan sumber daya publik bahkan tingginya tingkat korupsi di lingkungan pemerintahan (Emerson, 2006; Olken, 2007; Lessmann dan Marwardt, 2010). Hal ini menyebabkan pengelolaan sumber daya publik menjadi tidak efektif dan efisien serta penyediaan barang publik yang tidak sesuai baik itu kuantitas yang berlebihan atau kekurangan, maupun kualitas yang buruk (Gupta et al., 2002; Giroux, 1989).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian dilakukan di 8 (delapan) Pemerintah Kabupaten Kota se Provinsi Banten, dengan obyek penelitian yang dijadikan populasi dan sample adalah laporan keuanganyang telah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dari Tahun 2013 – 2016

Analisis yang digunakan menggunakan analisis deskriptif untuk melihat pengaruh Temuan audit, opini audit, tindak lanjut atas hasil pemeriksaan dan struktur anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah yang diproksikan dengan Indeks pembanguna manusia.

Untuk menguji pengaruh variable x terhadap Y, diajukan hipotesa yang ditujukan dari keempat variabel x, variable manakah yang memiliki pengaruh yang positif mempengaruhi variabel y, sebagai alat uji statistic, digunakan uji statistic ,emggunakan regresi linier berganda dengan rumusan sebagai berikut :

$$Y_{jt} = \beta_0 + \beta_1 TA_{jt} + \beta_2 OA_{jt} + \beta_3 TLHP_{jt} + \beta_4 SA_{jt} + \varepsilon_{jt}.$$

Keterangan :

Y : Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

β_0 : Koefisien Konstanta

β_{1-4} : Koefisien Regresi Variabel Independen



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini merupakan studi yang menganalisis pengaruh Temuan Audit, Opini Audit, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Struktur Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah Daerah yang diproyeksikan dengan Indeks Pembangunan Manusia.

Tabel Hasil Pengujian

Hipotesis	Koefisien B	Sig.	t Tabel	Keputusan
TA – KPD	-1.172	0.605	1.693	Ditolak
OA – KPD	7.645	0.011	1.693	Diterima
TLHP – KPD	-9.047	0.047	1.693	Diterima
SA - KPD	-7.644E-7	0.657	1.693	Ditolak

Pengaruh Temuan Audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Pengujian Hipotesis 1 dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah temuan audit BPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Banten. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 1 ini menghasilkan nilai koefisien sebesar -1.172, nilai t hitung sebesar -0.524, t tabel 1.693 dan dengan signifikansi 0.605 (<0.05). Karena *p value* berada dibawah 0.05 maka hipotesis 1 ditolak, artinya temuan audit atas laporan keuangan pemerintah daerah tidak berpengaruh pada kinerja pemerintah daerah. Hasil uji-t untuk Hipotesis 1 diperoleh angka -1.172 yang berarah negatif, itu berarti semakin banyaknya temuan audit BPK menggambarkan semakin buruknya kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut namun pengaruhnya tidak signifikan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Nur (2014) yang menyatakan bahwa variabel temuan audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan. Demikian pula dengan hasil penelitian dari Fandy (2015) yang menyatakan bahwa temuan audit tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten/kota. Temuan audit BPK dalam penelitian ini merupakan kasus-kasus yang ditemukan BPK terhadap laporan keuangan

pemerintah daerah atas pelanggaran yang dilakukan pemerintah daerah. Tetapi berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Akwan (2011), Purnamasari, dkk (2009), Hilmi (2012) dan Mustikarini dan Fitriyasi (2012), yang juga menyatakan bahwa Temuan Audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Output dari pemeriksaan BPK yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), yang didalamnya terdapat opini atas LKPD serta temuan-temuan hasil pemeriksaan. Berdasarkan Keputusan BPK RI No.5/K/I-XIII.2/8/2010 tanggal 27 Agustus 2010 tentang Petunjuk Teknis Koding Temuan Pemeriksaan, temuan pemeriksaan terdiri dari Temuan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Temuan Ketidapatutan terhadap peraturan perundang-undangan serta Temuan 3E (Ekonomis, Efisien dan Efektif) (BPK, 2011).

Sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan Pemda, maka Pemda wajib menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang kemudian akan di audit oleh institusi pemeriksa yang bebas dan mandiri, dalam hal ini adalah BPK RI. Selain Laporan Keuangan yang menggambarkan akuntabilitas keuangan, dalam rangka mewujudkan *good governance* pada Pemda, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (akuntabilitas kinerja). Untuk itu, dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan pelaksanaan manajemen pemerintahan yang lebih efisien, efektif, bersih, akuntabel dan berorientasi hasil, diperlukan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Taufik, 2013).

Pengaruh Opini Audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Pengujian hipotesis 2 dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah opini audit atas laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil pengujian hipotesis 2 ini menghasilkan nilai koefisien β_2 sebesar 7.645, nilai t hitung sebesar 2.734, t tabel 1.693 dan dengan signifikansi 0.011 ($p < 0,05$). Karena *p value* berada diatas 0.05 maka hipotesis 2 diterima.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus melaporkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan di instansinya. Laporan keuangan tersebut diperiksa terlebih dahulu kewajarannya oleh BPK sebelum dilaporkan kepada DPR dan DPRD. Hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK berupa opini atas kewajaran laporan keuangan yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Opini audit merupakan hasil dari proses audit dan salah satu faktor yang dapat menggambarkan kualitas audit (Wibowo dan Rossieta, 2009).

Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Pengujian hipotesis 3 dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dapat memberi pengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil pengujian hipotesis 3 ini menghasilkan nilai koefisien β_3 sebesar -9.047, nilai t hitung sebesar -2.081, t tabel 1.693 dengan signifikansi 0.047 ($p < 0.05$). Karena *p value* berada dibawah 0.05 maka hipotesis 3 diterima.

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa yang relevan berdasarkan temuan pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. Setiap temuan pemeriksaan dapat memiliki satu atau lebih rekomendasi. Rekomendasi dapat meminimalisasi akibat yang ditimbulkan dari penyimpangan dalam pengelolaan dan tanggungjawab keuangan. Oleh karena itu, sangat penting untuk ditindaklanjuti terutama berkaitan untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah yang diaudit. Selain itu, tindak lanjut dilakukan agar temuan temuan hasil pemeriksaan tidak terjadi secara berulang-ulang (Widiatmoko, 2012).

Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan adalah kegiatan dan/atau keputusan yang dilakukan oleh pejabat yang diperiksa dan/atau pihak lain yang kompeten untuk melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK wajib dilakukan oleh pejabat yang diperiksa. Pejabat yang diperiksa wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan selambat-lambatnya enam puluh hari setelah LHP

diterima. Apabila sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditentukan, maka pejabat wajib memberikan alasan yang sah, dan kemudian apabila tanpa adanya alasan yang sah, maka BPK dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang.

Hasil ini bertolak belakang dengan penelitian Dwiputrianti (2011), yang menyatakan bahwa tindak lanjut dari hasil temuan dan rekomendasi dari pemeriksaan masih relatif rendah. Penelitian ini mengindikasikan pengaruh tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap kinerja pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan.

Pengaruh Struktur Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Pengujian hipotesis 4 dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah struktur anggaran berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil pengujian hipotesis 4 ini menghasilkan nilai koefisien β_4 sebesar $-7.644E-7$, nilai t hitung sebesar -0.449 , t tabel 1.693 dan dengan signifikansi 0.657 ($p < 0.05$). Karena p value berada dibawah 0.05 maka hipotesis 4 ditolak.

Keseriusan pemerintah Indonesia mengenai otonomi daerah diwujudkan dengan dihasilkannya UU No. 22 tahun 1999 yang telah diganti dengan UU No. 32 tahun 2004 mengenai pembagian kewenangan di pemerintah daerah, dan UU No. 25 tahun 1999 yang telah diganti dengan UU No. 33 mengenai Pembagian Keuangan antara Pusat dan Daerah. Undang-undang tersebut telah dijadikan sebagai aturan umum dalam implementasi kebijakan otonomi daerah di seluruh Indonesia. Kecuali Aceh dan Propinsi Papua yang memperoleh otonomi khusus.

Adanya dana perimbangan dalam otonomi daerah merupakan bentuk tanggung jawab dari pemerintah pusat atas berjalannya proses otonomi daerah. Hal ini juga sebagai wujud bahwa walaupun sistem yang diterapkan adalah sistem otonomi daerah, akan tetapi tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun di sisi yang lain, adanya dana perimbangan yang terlalu besar akan menimbulkan persepsi bahwa daerah tersebut tidak mandiri secara fiskal dan akan sampai pada kesimpulan akhir bahwa otonomi daerah tidak efektif untuk dilaksanakan.



KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

Berdasarkan analisa data dan uji statistic maka didapat hasil penelitian sebagai berikut :

1. Hasil penelitian hipotesis 1 menunjukkan bahwa Temuan Audit berpengaruh negatif secara statistik terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Dengan kata lain, naik dan turunnya variabel Temuan Audit tidak mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah;
2. Hasil penelitian hipotesis 2 menunjukan bahwa Opini Audit berpengaruh positif secara statistik terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini berarti, Opini Audit semakin lama mampu mendorong Kinerja Pemerintah Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten, namun selain variabel Temuan Audit terdapat variabel-variabel lain di luar penelitian ini yang mungkin memiliki pengaruh lebih kuat terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini juga dapat disebabkan karena terdapat regulasi yang ketat mengenai Opini Audit pada APBD di SKPD Dinas pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten;
3. Hasil penelitian hipotesis 3 menunjukkan bahwa Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan berpengaruh positif secara statistik terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan arah negatif. Dengan kata lain, turunnya nilai variabel Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada periode tertentu akan pengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah menjadi lebih baik, begitu juga sebaliknya, semakin nilai variabel Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan tinggi pada periode waktu tertentu maka kualitas Kinerja Pemerintah Daerah semakin menurun.
4. Hasil penelitian hipotesis 4 menunjukan bahwa Struktur Anggaran tidak pengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini berarti, naik atau turunnya Struktur Anggaran pada periode waktu tertentu tidak akan meningkatkan kualitas Kinerja Pemerintah Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten.

Berdasarkan hasil penelitian dan juga keterbatasan dalam penelitian ini, maka saran untuk tindak lanjut hasil penelitian ini, yaitu:

1. Akademik
 - Fokus penelitian ini adalah Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten, untuk penelitian selanjutnya dapat diperluas dengan mengambil sektor lainnya;



- Penelitian selanjutnya sebaiknya mempertimbangkan untuk menambahkan variabel lain di luar variabel yang digunakan dalam penelitian ini, seperti Belanja Daerah dan variabel yang lainnya yang dapat mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah.

2. Pemerintah

Berdasarkan hasil uji hipotesa pada penelitian ini maka didapat variable opini audit dan Tindak Lanjut Hasil penelitian memiliki pengaruh yang positif dan dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kinerja pemerintah.

Dapat dikatakan bahwa pada Tata Kelola Keuangan, untuk dapat meningkatkan kinerja pemerintah yang diprosikan dengan Indeks Pembangunan Manusia, pemerintah fokus pada peningkatan kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan standar laporan keuangan, dan memiliki transparansi dan akuntabilitas yang baik sesuai dengan *Good Corporate Governance* sehingga pengukuran dan penilaian atas penyajian laporan keuangan oleh auditor eksternal dapat diberikan pendapat Wajar tanpa Pengecualian. Yang dapat dipersepsikan bahwa laporan keuangan yang berkualitas memiliki tingkat capaian kinerja program yang optimal sesuai dengan target target yang telah ditetapkan.

Selain pada itu, untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, penyelesaian atas temuan audit dalam bentuk penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaam sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah.

Secara teknis untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, kepala daerah selaku pemangku kebijakan dapat membuat dan mengaplikasikan tata kelola keuangan berbasis system informasi yang menyeluruh yang meliputi system penetapan target kinerja, penyusunan anggaran dan pengendalian pelaksanaan anggaran. Sehingga control setiap detail anggaran baik penyusunan maupun pelaksanaan dapat dilakukan by process dan sebagai early warnng system untuk perbaikan dan evaluasi.

Kemudian sebagai fungsi pengukuran dan evaluasi anggaran, penguatan Sistem Pengendalian Internal harus decontrol dan diawasi secara ketat dan berjenjang spade setiap hierarki organisasi. Penguatan Sistem Pengdalian Internal ini dapat dilakukan melalui peningkatan



kualitas sumberdaya apparatus pemeriksa, aparatur pengelola keuangan dan penerapan system informasi keuangan yang terintegrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Abdul Halim, 2004, Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Revisi, Jakarta, Salemba Empat.
Alim, M.N., T. Hapsari, dan L. Purwanti. 2007. Pengaruh Kompetensi dan Independensi terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor sebagai Variabel Moderasi. Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar
Akbar, Rusdi., Pilcher, Robyn dan Perrin, Brian. 2012. *Performance Measurement in Indonesia: The Case of Local Government*. Pasific Accounting Review (Vol. 24 No. 3; 262-291).
Anida, Iswanto. 2013. Pengaruh Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Sistem Pengendalian Terhadap Keandalan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Thesis. Universitas Lampung.
Arikunto, S. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Cetakan Ke dua belas, edisi revisi V. Jakarta: Rineka Cipta.
Arens, Alvin A., Elder, Randa J; Beasley, Mark S, 2008, *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach*, 12 th Edition, Pearson, Prentice Hall Inc.
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. 2007. *Akuntabilitas Instansi Pemerintah*.
Bahrullah Akbar, Siti Nurbaya, 2000, Akuntabilitas Daerah : Tinjauan Pemikiran Pelaksanaannya Dalam Rangka Otonomi Daerah, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Pemerintahan, Vol 01, No. 01, IAI Kompartemen Akuntan Sektor Publik.
Bernardin, John H., dan Russel, Joyce E. A., *Human Resources Managment: An. Experiental Approach* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1993).
Bilson, Simamora, 2004, *Riset Pemasaran*, Jakarta, Gramedia Utama.
Bonner, Rivera, & Zimmerman, B. J. 1997. Part 1: General Theories and Models of Self- Regulation. *The Handbook of Self Regulation*, 20.
Buchari, Zainun. (1994). *Manajemen dan Motivasi*. Jakarta: Balai Aksara.
Casio, 1992. *Human Resources*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
Chowdhury, G, G. 1999. *Introduction to Modrern Information Retrieval*. London: Library Association Publishing.
Depdiknas .2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta; Balai Pustaka.
De Angelo, LE (1981). "Auditor Size and Auditor Quality". *Journal of Accounting and Economics*, Dec, Vol.3, No.3:183-199.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2012. *Deskripsi dan Analisis APBD*.
Donald L. Deis. Dan Gari A. Giroux. 1992. "Determinants of Audit Quality in the Public Sector". *The Accounting Review* Vol. 67 No. 3 (July). Pp. 462-479.
Donnelly, James H., Gibson, James L., and Ivancevich, John, 1994, *Fundamental of Management*. Texas: Business Publication.
Efendy, Taufiq. 2010. Pengaruh Kompetensi, Independensi, Dan Motivasi Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Gorontalo) .Universitas Diponegoro.
Elychia, Roly Putri. 2014. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2008-2012). Skripsi. Universitas Lampung.
Emerson, Joni, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsolidasi, Arbitrase)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Gomes, Faustino Cardoso. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Andi Offset.



- Griffin, R.W., 1987. *Management*, Second Edition, Boston: Houghton Mifflin. Press.
- Fatah, N. (2000). *Ekonomi & Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Fandy, Nurdin. 2015. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK RI Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal. Universitas Brawijaya*.
- Fontanella, Amy dan Rossieta, Hilda. 2014. *Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi 17. (<http://multiparadigma.lecture.ub.ac.id>, diakses pada 19 Desember 2014).
- Garrison, Ray H., Eric W. Noreen, 2000. *Akuntansi Manajerial*, Buku 1, Alih. Bahasa A. Totok Bidisantoso, Salemba Empat, Jakarta.
- Gupta, K., Hooton, T.M., Naber, K.G., Wullt, B., Colgan, R., Miller, L.G., et al., 2011, *Infectious Diseases Society of America, European Society for Microbiology and Infectious Diseases, International clinical practice guidelines for the treatment of acute uncomplicated cystitis and pyelonephritis in women: a 2010 update by the Infectious Diseases Society of America and the European Society for Microbiology and Infectious Diseases*, *Clin Infect Dis*, 52(5), 03-20.
- Haryanto, Tri Joko. 2000. *Kemandirian Daerah: Sebuah Perspektif dengan Metode Path Analysis*. Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan Republik Indonesia (<http://www.fiskal.depkeu.go.id>, diakses pada 28 Desember 2014).
- Hasibuan, Malayu S.P. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Hilmi, Zul, Amiruddin dan Martani, Dwi. 2012. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi*. Forum: Simposium Nasional Akuntansi 15. (<http://www.sna.akuntansi.unikal.ac.id>, diakses pada 16 April 2014
<http://www.menpan.go.id>)
- Ida, Suraida. 2005. "Pengaruh Etika, Kompetensi, Pengalaman Audit dan Risiko Audit terhadap Skeptisisme Profesional Auditor dan Ketepatan Pemberian Opini Akuntan Publik". *Sosiohumaniora*, Vol. 7 No. 3, November 2005: 186202.
- Inarto, Agoes. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA-LAN). (<http://www.stialan.ac.id>, diakses pada 3 Oktober 2014).
- Indrarti, Nuansa Mega Okky. 2011. Hubungan antara Opini Audit pada Laporan Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal. Universitas Riau*.
- Jones, Charles P. (2014). *Investments Principles and Concepts*. Wiley.
- Kotler, Philip and Kevin Lane Keller. 2012. *Marketing Management* 13. New Jersey: Pearson Prentice Hall, Inc.
- Kisnawati, Baiq. 2012. Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Etika Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada Auditor Pemerintah di Inspektorat Kabupaten dan Kota Se-Pulau Lombok). *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*. Vol. 8, No. 3.
- Kuntadi, Cris. 2008. *Pengaruh Audit Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Publik Pemerintah Daerah*. (<http://criskuntadi.blogspot.com>, diakses pada 28 Desember 2014).
- Lessman, Christian. (2006). *Fiscal Decentralization and Regional Disparity: A panel data approach for OECD countries*. Ifo Working Papers.
<http://www.cesifogroup.de/portal/pls/portal/docs/1/1197172.PDF>.
- Liestiani, Annisa. 2008. *Pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota di Indonesia untuk Tahun Anggaran 2006. Skripsi Sarjana. FEUI. Depok*
- Mardismo. 2003. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada. (<http://mgb.ugm.ac.id>, diakses pada 27 Desember 2014).
- Mawardi, Wisnu. 2005. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Bank Umum Di Indonesia (Studi Kasus Pada Bank Umum Dengan Total Assset Kurang Dari 1 Triliun)". *Jurnal Bisnis Strategi*, Vol. 14, No. 1, Hal: 83-93, Juli 2005.
- Mimba, Putu, Ni. Helden, G Jan dan Tillema, Sandra. 2007. *Public Sector Performance Measurement in Developing Countries*. *Journal of Accounting and Organizational* (<http://media.proquest.com>, diakses pada 12 November 2014)



- Mustikarini, Widya Astuti dan Fitriyasi, Debby. 2012. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007*. Forum: Simposium Nasional Akuntansi 15. (<http://www.sna.akuntansi.unikal.ac.id>, diakses pada 16 April 2014).
- Nur, Lailatul Khasanah. 2014. Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas, dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada LKPD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2010-2012). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 3(3):1-11.
- Notoatmodjo*, Soekidjo. 2003. Pendidikan Dan Perilaku Kesehatan. Rineka. Cipta. Jakarta.
- Olken, B.A dan R. Pande. 2012. Corruption in Developing countries. *Annual Review of Economics* 4 (2012): 479-509.
- Prawirosentono*, Suyadi. 1999. Kebijakan Kinerja Karyawan. Yogyakarta: BPFE.
- Riantiaro, Reynaldi dan Azlina, Nur. 2011. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. *Pekbis Jurnal* (Vol. 3, No. 3; 560568).
- Sadili *Samsudin* (2005), Manajemen Sumber Daya Manusia, Pustaka Setia.
- Saifuddin. 2004. Pengaruh Kompetensi dan Independensi Terhadap Opini Audit Going Concern (Studi Kuasiekperimen pada Auditor dan Mahasiswa). Semarang. Tesis tidak dipublikasikan. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Sarwono*, W. Sarlito, 2004. Psikologi remaja. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada.
- Schunk, D.H & Zimmerman, B.J. (Eds). (1998). *Self Regulated Learning: From Teaching to Self Reflective Practice*. New York : The Guilford Press.
- Schermerhorn*, J. R., *Hunt*, J. G., & *Osborn*, R.N. (2000). *Managing.mOrganizational Behavior*. New York: John Willey & Son.
- Sedarmayanti*. 2001. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung: Mandar Maju.
- Sekar, Mayangsari. 2003. Pengaruh Keahlian Audit dan Independensi terhadap Pendapat Audit: Sebuah Kuasieksperimen. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia* Vol 6, hal 122.
- Shaw, E. M., 1979. *Dynamics of Small Group Behavior*. Tata McGraw-Hill Publishing Company Ltd. New Delhi.
- Sudarsana, Susila Hafidh. 2013. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*. *Diponegoro Journal of Accounting* (Vol. 2, No. 4; 1-13)
- Suhardjanto, Djoko dan Yuliningtyas, Rukmita Rena. 2011. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Auditing* (Vol.8, No.1; 194)
- Sumarjo, Hendro. 2010. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Suyanto. *Menyoal Desentralisasi Fiskal: Mempertanyakan Akuntabilitas Keuangan Pemerintahan Daerah*. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA-LAN). (<http://www.stialan.ac.id>, diakses pada 19 Desember 2014).
- Stolovitch*, Harold D., and *Keeps*, Erica J., 1992, *Handbook of Human*.
- Syarif*, Rusli. 1991. Produktivitas. Bandung: Angkasa.
- Taufik, Taufeni. 2013. *Peran Monitoring dan Evaluasi Terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah*. *Jurnal Akuntansi* (Vol.1, No. 2; 199-212)
- Taufiq*. 2013. *Sistem Informasi Manajemen Konsep Dasar, Analisis dan. Metode Pengembangan*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Umar, Husein. 1999. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Raja Grafindo. Jakarta.
- Veithzal, Rivai. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Virgasari, A. (2009). Hubungan antara opini audit pada laporan keuangan daerah, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum dengan kinerja keuangan daerah. Skripsi Universitas Brawijaya.
- Wibowo, Puji. 2008. *Mencermati Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah*. *Jurnal Keuangan Publik* (Vol. 5, No. 1; 55-83)
- Wijaya, Citra H Anthonius dan Akbar, Rusdi. 2013. *The Influence of Information, Organizational Objective and Targets, and External Pressure Toward The Adoption of Performance Measurement System in Public Sector*. *Journal of Indonesian Economy and Business* (Vol.28, Number 1; 62-83).



- Wood V, *et al.* (2001) A re-annotation of the *Saccharomyces cerevisiae* genome. *Comp Funct Genomics* 2(3):143-54.
- Yamit, Zulian. 2001, *Manajemen Kualitas Produk dan Jasa*, Yogyakarta: Ekonosia.
- Yurniwati dan Eka D.P. 2004. *Hubungan Pengalaman Dan Situasi Audit Dengan Skeptisisme Profesional Auditor*. Laporan Penelitian. Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- Zawitri, S. (2009). *Analisis faktor-faktor penentu kualitas audit yang dirasakan dan kepuasan auditee di pemerintahan daerah*. Tesis Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.